



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta 10710
Telp/Fax: (+6221) 3510574
website: <http://ppid.kemenag.go.id> email: ppid@kemenag.go.id

Nomor : SJ/ 3959 /B.VIII.2/HM.00/8/2021
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Penyampaian KMA No. 657 Tahun 2021
tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

31 Agustus 2021

Yth: (daftar terlampir)
Selaku Atasan PPID Unit
Kementerian Agama RI
se-Indonesia

Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menteri Agama telah menandatangani Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama dimaksud menggantikan Keputusan Menteri Agama Nomor 461 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Sedangkan untuk pedoman layanan informasinya, Menteri Agama telah menandatangani Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar keterbukaan informasi publik di satuan kerja masing-masing terlaksana dengan semestinya, kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara/i, antara lain:

1. Menetapkan susunan dan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada satuan kerja masing-masing.
2. Menambahkan menu PPID pada website satuan kerja masing-masing sebagai kanal informasi publik.
3. Membuat sub menu pada menu PPID yang terdiri dari: Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Tersedia Setiap Saat (sebagaimana daftar terlampir).

Untuk informasi lebih lanjut Saudara/i dapat menghubungi Sdr. Rosidin HP. 0811131791 atau Sdr. Syamsuddin 082112122937.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal
Selaku Atasan PPID Utama
Kementerian Agama

Nizar

Tembusan :
Menteri Agama sebagai Pembina PPID Kementerian Agama

Lampiran Surat:

SJ/3959/B.VIII.2/HM.00/8/2021

No.	Nama Jabatan	Selaku Atasan PPID
1	Inspektur Jenderal	Inspektorat Jenderal
2	Direktur Jenderal Pendidikan Islam	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
3	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
4	Direktur Jenderal Bimas Islam	Direktorat Jenderal Bimas Islam
5	Direktur Jenderal Bimas Kristen	Direktorat Jenderal Bimas Kristen
6	Direktur Jenderal Bimas Katolik	Direktorat Jenderal Bimas Katolik
7	Direktur Jenderal Bimas Hindu	Direktorat Jenderal Bimas Hindu
8	Direktur Jenderal Bimas Buddha	Direktorat Jenderal Bimas Buddha
9	Kepala Badan Litbang dan Diklat	Badan Litbang dan Diklat
10	Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
11	Rektor UIN/UHN/IAIN/IAKN	UIN/UHN/IAIN/IAKN
12	Ketua STAIN/STAKPN/STAKAtN/STAHN/STABN	STAIN/STAKPN/STAKAtN/STAHN/STABN
13	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi	Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
14	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
15	Kepala Balai Litbang Agama	Balai Litbang Agama
16	Kepala Balai Diklat Keagamaan	Balai Diklat Keagamaan

f

/

INFORMASI PUBLIK YANG TERCANTUM DALAM MENU PPID PADA WEBSITE SATUAN KERJA SEKURANG-KURANGNYA TERDIRI DARI:

NO.	NAMA INFORMASI
1	Sub Menu Profil PPID , terdiri dari:
a	Sejarah, (Merupakan narasi singkat mengenai terbentuknya PPID)
b	Tugas Fungsi PPID
c	SK Penetapan PPID
d	Struktur Organisasi PPID
e	Visi Misi PPID
2	Sub Menu Regulasi (Merupakan regulasi yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, bisa dilihat di website ppid Kementerian Agama)
3	Sub Menu Layanan Informasi , terdiri dari:
a	Tata Cara Permohonan Informasi
b	Tata Cara Pengajuan Keberatan
c	Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
d	Formulir Permohonan Informasi
e	Formulir Keberatan
f	SOP Layanan Informasi (SOP Pengelolaan Permohonan Informasi, SOP Pengelolaan Keberatan atas informasi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP, SOP Pengujian tentang Konsekuensi, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan) (bisa dilihat pada ppid.kemenag.go.id menu Layanan Informasi)
4	Sub Menu Standar Layanan , terdiri dari:
a	Maklumat Pelayanan
b	Jadwal Pelayanan
c	Biaya/Tarif Pelayanan
	(bisa dilihat pada ppid.kemenag.go.id menu Standar Layanan)
5	Sub Menu Informasi Publik , terdiri dari kelompok:
a	Informasi Berkala
	-Alamat kantor lengkap satuan kerja
	-Tugas Fungsi satuan kerja
	-Struktur Organisasi satuan kerja
	-Sejarah terbentuknya Satuan Kerja
	-Profil singkat Pimpinan Satuan Kerja (Minimal memuat informasi tentang nama, jabatan, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan)
	-Lembar Berita Negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan Satuan Kerja (Tahun terakhir)
	-Rencana Kerja dan Anggaran (tahun berjalan)
	-Kalender Kegiatan/ Kerja (tahun berjalan)
	-Laporan Kinerja Satuan Kerja (tahun berjalan)
	-Laporan Keuangan (audited) (tahun sebelumnya).
	-Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan oleh satuan kerja masing-masing.

	-Informasi Data Perbendaharaan atau Inventaris Barang Milik Negara (tahun sebelumnya).
	-Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan satuan kerja (copy link WBS pada website Inspektorat Jenderal).
	-Data Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) (khusus Ditjen PHU, Kanwil, Kankemenag Kab/Kota)
	-Data Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) (khusus Ditjen PHU, Kanwil, Kankemenag Kab/Kota)
	-Data Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBH) (khusus Ditjen PHU, Kanwil, Kankemenag Kab/Kota)
	-Laporan Penyelenggaraan Ibadah Haji (khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah)
	-Laporan Hasil Survei Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (SKJHI) (minimal 3 tahun terakhir) (khusus Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah)
	Tambahan pada Kanwil dan Kankemenag Kabupaten/Kota
	-Data FKUB Provinsi dan Kabupaten/Kota
	-Data Desa Sadar Kerukunan
	Tambahan pada Badan Penyelenggara Jaminan Prpduk Halal
	-Daftar Nama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
	-Daftar Nama Auditor Halal
b	-Daftar Nama Pengawas Jaminan Produk Halal -Daftar Nama Sertifikat Halal beserta Nama Produknya
c	Informasi Tersedia Setiap Saat
	-Daftar Informasi Publik
	-Rencana Strategis (Renstra) yang masih berlaku
	-Dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 3 tahun terakhir (berupa: rancangan, naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, dan/atau risalah rapat)
	-Rencana Strategis satuan kerja masing-masing (terakhir)
	-Data statistik satuan kerja masing-masing